
Menghadapi Disinformasi dan Misinformasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024: Peran Strategis Muslimat NU dan Muhammadiyah

Bachruddin Ali Akhmad¹, Sri Astuty², Sarwani³, Muhammad Ainani⁴

Universitas Lambung Mangkurat^{1,2,3}

bachruddin.aliakhmad@ulm.ac.id¹, muhhammad.ainani@ulm.ac.id⁴

Abstrak: Disinformasi dan misinformasi politik telah menjadi ancaman signifikan bagi demokrasi, terutama dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi peran kelompok keagamaan Muslimat NU dan Muhammadiyah di Kalimantan Selatan dalam menghadapi disinformasi menjelang pemilihan kepala daerah 2024. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode diskusi kelompok terfokus (FGD), penelitian ini mengkaji strategi yang diterapkan oleh kedua organisasi dalam mengedukasi anggota mereka tentang literasi digital dan politik, serta mengedepankan prinsip "tabayyun" sebagai bentuk verifikasi informasi. Temuan menunjukkan bahwa kedua kelompok ini memiliki peran krusial sebagai agen literasi dalam komunitas, dengan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi. Muslimat NU menekankan pada edukasi rutin dan konsultasi, sementara Muhammadiyah memfokuskan pada prinsip kehati-hatian dalam menyaring informasi. Studi ini juga menemukan bahwa rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat menjadi tantangan utama dalam mencegah penyebaran disinformasi. Hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan kelompok keagamaan dalam meningkatkan literasi digital guna menjaga integritas demokrasi. Rekomendasi kebijakan diusulkan untuk memperkuat peran kelompok keagamaan dalam mendukung proses pemilihan yang adil dan transparan.

Kata Kunci: disinformation, misinformation, Muslimat NU, Muhammadiyah, digital literacy.

PENDAHULUAN

Disinformasi dan misinformasi politik telah menjadi fenomena global yang sangat mengkhawatirkan, terutama dalam konteks pemilihan umum. Istilah disinformasi pertama kali dikenal sebagai "dezinformatsiya," sebuah istilah yang berasal dari Rusia dan muncul pada era Perang Dingin sekitar tahun 1949. Pada masa itu, disinformasi digunakan oleh pemerintah otoriter, termasuk sekutu-sekutunya di media, sebagai kampanye yang disengaja untuk menyesatkan dan memanipulasi opini publik. Taktik ini bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik serta hasil pemilu di negara-negara demokratis (Armitage & Vaccari, 2021). Dalam konteks modern, disinformasi terus berkembang seiring dengan

peningkatan penggunaan teknologi digital dan media sosial, yang secara signifikan mempercepat penyebaran informasi yang salah dan menyesatkan (Nygren et al., 2022).

Misinformasi dan disinformasi politik telah menjadi isu yang semakin mendesak dalam konteks komunikasi digital saat ini. Misinformasi umumnya didefinisikan sebagai informasi yang salah yang disebarluaskan tanpa niat untuk menipu, sedangkan disinformasi adalah informasi yang sengaja dimanipulasi atau dibuat untuk menyesatkan dan mencapai keuntungan politik (Neylan, 2021). Dalam banyak kasus, disinformasi digunakan sebagai alat untuk memengaruhi opini publik dan mengendalikan narasi politik, yang sering kali berujung pada erosi kepercayaan terhadap institusi demokratis (Bennett & Livingston, 2018).

Salah satu contoh yang mencolok adalah kampanye disinformasi yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Brasil, di mana disinformasi digunakan untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu penting dan memperkuat posisi politik tertentu (McRae et al., 2022; , Soares et al., 2021). Di Brasil, misalnya, disinformasi terkait COVID-19 tidak hanya memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan kesehatan, tetapi juga memperburuk krisis politik yang dihadapi oleh pemerintah (Soares et al., 2021). Hal ini menunjukkan bagaimana disinformasi dapat berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan politik dalam situasi yang sulit.

Di sisi lain, disinformasi juga berperan dalam memperkuat ketidaksetaraan sosial, seperti yang terlihat dalam konteks gender. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan sering menjadi target utama dalam kampanye disinformasi, yang dapat memperburuk ketidakadilan gender dalam politik (Ouyang et al., 2021; , "Gender-Based Disinformation: A scoping review of the literature, 2013-2023", 2023). Selain itu, disinformasi yang beredar di media sosial sering kali dipengaruhi oleh polarisasi politik, di mana kelompok-kelompok tertentu lebih rentan terhadap penyebaran informasi yang salah (Rao & Lerman, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa disinformasi tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga dapat memperburuk ketegangan sosial dan politik di tingkat masyarakat.

Dalam konteks demokrasi, disinformasi memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi politik. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang terpapar disinformasi cenderung lebih skeptis terhadap proses politik dan institusi yang ada, yang pada gilirannya dapat mengurangi partisipasi mereka dalam pemilu dan kegiatan politik lainnya (Ikran, 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk menangkal disinformasi, termasuk peningkatan literasi media dan keterlibatan masyarakat dalam memerangi penyebaran

informasi yang salah (Martínez-García & Ferrer, 2023; , Austin et al., 2021).

Secara keseluruhan, disinformasi dan misinformasi politik merupakan tantangan serius yang memerlukan perhatian dan tindakan kolektif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, media, dan masyarakat sipil. Upaya untuk memahami dan mengatasi fenomena ini harus melibatkan pendekatan yang komprehensif dan berbasis bukti, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan politik yang lebih luas (Bennett & Livingston, 2018; , Steinfeld, 2022).

Sejumlah studi menunjukkan bahwa disinformasi politik berdampak signifikan pada hasil pemilu. Salah satu contohnya adalah pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2016, di mana disinformasi yang beredar melalui media sosial diduga memiliki peran dalam memengaruhi preferensi pemilih. Bahkan ditemukan adanya pabrik “berita palsu” yang beroperasi di Makedonia dengan tujuan menyebarkan informasi yang salah guna mendukung kepentingan pihak tertentu, seperti negara Rusia (Hemmer, 2024). Kasus serupa terjadi pada beberapa negara Eropa, seperti Prancis dan Jerman, di mana gerakan populis memanfaatkan disinformasi untuk menggalang dukungan politik melalui narasi yang tidak akurat atau sengaja dipelintir (Lecheler & Egelhofer, 2020).

Disinformasi bukan hanya tantangan bagi negara-negara Barat; Indonesia juga mengalami permasalahan yang serupa. Dalam beberapa tahun terakhir, disinformasi politik semakin marak menjelang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Peningkatan pengguna internet di Indonesia, yang mencapai 77% dari total populasi pada tahun 2022, menjadikan media sosial sebagai saluran utama penyebaran informasi, baik yang valid maupun yang salah (Kominfo, 2022). Pemilu di Indonesia, seperti yang terlihat pada pemilihan presiden 2019 dan pemilihan kepala daerah serentak sebelumnya, dipenuhi dengan berita bohong atau hoaks yang seringkali digunakan untuk menjatuhkan lawan politik atau membentuk opini publik dengan cara yang manipulatif (Rahmawan & Garnesia, 2023).

Dalam situasi seperti ini, peran kelompok keagamaan menjadi sangat penting dalam menangani disinformasi dan misinformasi. Kelompok-kelompok keagamaan memiliki pengaruh sosial yang signifikan di masyarakat Indonesia, mengingat tingginya tingkat religiusitas masyarakat. Mereka sering berfungsi sebagai opinion leader yang dipercaya oleh komunitas mereka, dan karena itu memiliki potensi besar untuk menyebarkan informasi yang benar atau, sebaliknya, menjadi saluran penyebaran disinformasi jika tidak dikelola dengan baik. Muslimat NU, Muhammadiyah, dan kelompok-kelompok keagamaan lainnya telah memainkan peran penting

dalam membentuk opini publik, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat literasi politik yang rendah (Prathama et al., 2022).

Peran kelompok keagamaan dalam menyikapi disinformasi dan misinformasi politik sangatlah kompleks dan beragam, tergantung pada konteks sosial, politik, dan budaya di mana kelompok tersebut berada. Dalam banyak kasus, kelompok keagamaan dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam melawan disinformasi; namun, di sisi lain, mereka juga dapat terjebak dalam penyebaran informasi yang salah, terutama ketika informasi tersebut sejalan dengan agenda politik tertentu. Salah satu peran penting kelompok keagamaan adalah sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya. Dalam konteks Indonesia, misalnya, penyuluh agama memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran agama dan isu-isu sosial-politik yang relevan (Noorbani, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama sering kali kurang memiliki peran dalam respons dini terhadap konflik keagamaan, dan pandangan mereka sering diabaikan oleh pembuat kebijakan (Noorbani, 2023).

Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas penyuluh agama dalam menangani disinformasi yang berkaitan dengan isu-isu politik. Di sisi lain, kelompok keagamaan seperti Jamaah Tabligh, yang awalnya fokus pada dakwah murni, telah mulai terlibat dalam politik praktis, termasuk dalam pemilihan presiden (Hamdi, 2023). Keterlibatan ini menunjukkan bahwa kelompok keagamaan dapat berperan dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi hasil politik, tetapi juga berpotensi untuk menyebarkan disinformasi jika tidak diimbangi dengan pemahaman yang baik tentang isu-isu politik yang kompleks (Hamdi, 2023).

Politisasi agama juga menjadi tantangan signifikan dalam konteks disinformasi. Penelitian menunjukkan bahwa politisasi agama dapat menciptakan kondisi yang tidak sehat bagi demokrasi, di mana informasi yang salah digunakan untuk memanipulasi opini publik dan memperkuat polarisasi politik (Kurniawan, 2018). Dalam hal ini, kelompok keagamaan perlu berperan aktif dalam menanggapi dan melawan narasi yang menyesatkan, serta mengedukasi anggota mereka tentang pentingnya verifikasi informasi (Kurniawan, 2018).

Selain itu, kelompok keagamaan juga dapat berfungsi sebagai mediator dalam konflik yang dipicu oleh disinformasi. Misalnya, Aliansi Ulama Madura (AUMA) menggunakan pendekatan persuasif dan preventif untuk merespons isu politik-keagamaan, yang membantu mengurangi eskalasi konflik di daerah tersebut (Topan, 2022). Pendekatan ini menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, kelompok keagamaan dapat berkontribusi pada stabilitas

sosial dan politik.

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam konteks meningkatnya penyebaran disinformasi melalui media sosial. Penelitian menunjukkan bahwa anonimitas dan keterbukaan di platform media sosial memudahkan penyebaran berita palsu, dan kelompok keagamaan perlu mengembangkan strategi untuk melawan fenomena ini (Legowo, 2023). Penggunaan teknologi dan pendekatan berbasis data untuk menganalisis dan mengatasi disinformasi dapat menjadi langkah penting dalam upaya ini (Legowo, 2023).

Secara keseluruhan, kelompok keagamaan memiliki potensi yang signifikan dalam menyikapi disinformasi dan misinformasi politik. Namun, untuk dapat berfungsi secara efektif, mereka perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu politik, memperkuat kapasitas mereka dalam memberikan informasi yang akurat, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melawan penyebaran informasi yang salah.

Salah satu tantangan utama dalam menghadapi disinformasi politik di Indonesia adalah rendahnya tingkat literasi digital dan politik di kalangan masyarakat umum. Masyarakat sering kali tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk mengevaluasi kebenaran informasi yang mereka terima, baik melalui media massa maupun media sosial. Hal ini diperburuk oleh adanya bias kognitif, di mana individu cenderung menerima informasi yang sesuai dengan pandangan atau keyakinan mereka tanpa memverifikasi validitas informasi tersebut (Brashier, 2024). Rendahnya literasi informasi ini membuka ruang bagi penyebaran disinformasi yang lebih luas, terutama dalam konteks politik, di mana isu-isu sensitif seperti agama, etnis, dan gender sering kali digunakan untuk mempolarisasi masyarakat.

Disinformasi dan misinformasi juga menjadi ancaman serius bagi proses demokrasi. Pemilu yang sehat membutuhkan informasi yang akurat agar pemilih dapat membuat keputusan yang rasional. Ketika disinformasi menyusupi ruang publik, kepercayaan publik terhadap proses pemilu dapat tergerus, dan hasil pemilu pun dapat terdistorsi oleh informasi yang tidak benar. Hal ini dapat memperburuk konflik politik dan sosial di masyarakat, sebagaimana yang telah terlihat di berbagai negara, termasuk Indonesia (Campbell & Coleman, 2024). Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang sistematis dan strategis untuk mengatasi disinformasi politik, terutama menjelang dan selama proses pemilu.

Di Indonesia, beberapa pendekatan telah diterapkan untuk menangani disinformasi politik. Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), telah melakukan berbagai inisiatif, termasuk pemblokiran situs-situs penyebar hoaks dan kampanye literasi

digital. Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya efektif karena disinformasi masih terus menyebar melalui platform media sosial yang sulit diawasi sepenuhnya. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dengan kelompok-kelompok masyarakat, termasuk kelompok keagamaan, untuk mengatasi permasalahan ini. Kelompok keagamaan yang memiliki jaringan luas di masyarakat dapat menjadi mitra strategis dalam upaya literasi politik dan digital, serta dalam memberikan pencerahan kepada komunitas mereka terkait pentingnya informasi yang akurat (Rahmawan & Garnesia, 2023).

Penelitian ini berfokus pada bagaimana kelompok keagamaan di Kalimantan Selatan, khususnya Muslimat NU dan Muhammadiyah, berperan dalam mengatasi disinformasi dan misinformasi politik menjelang pemilihan kepala daerah serentak yang akan diadakan pada tahun 2024. Pemilihan kepala daerah di Kalimantan Selatan menjadi studi kasus yang menarik karena wilayah ini memiliki keragaman agama dan tingkat religiositas yang tinggi, di mana pengaruh kelompok keagamaan sangat kuat dalam membentuk preferensi politik masyarakat. Selain itu, tingkat literasi digital di Kalimantan Selatan relatif rendah, yang membuat masyarakatnya rentan terhadap disinformasi yang tersebar melalui media sosial dan platform digital lainnya.

Muslimat NU dan Muhammadiyah, dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani disinformasi dan misinformasi politik. Muslimat NU, misalnya, menggunakan pendekatan edukatif melalui pencerahan dan konsultasi rutin kepada anggotanya, sementara Muhammadiyah lebih menekankan pada prinsip tabayyun atau kehati-hatian dalam menyaring informasi sebelum menyebarkannya kepada publik. Pendekatan-pendekatan ini mencerminkan keragaman strategi yang dapat diterapkan oleh kelompok-kelompok keagamaan dalam mengatasi disinformasi, tergantung pada karakteristik dan nilai-nilai yang mereka anut (Amalia & Palapah, 2023).

Penelitian ini penting karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran kelompok keagamaan dalam menangani disinformasi politik, khususnya di wilayah dengan literasi digital yang rendah. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya penyusunan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani disinformasi politik di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan wawasan tentang bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dapat dilibatkan dalam upaya literasi digital dan politik sebagai bagian dari strategi untuk menjaga integritas proses pemilihan umum.

Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji strategi-strategi yang diterapkan oleh Muslimat NU

dan Muhammadiyah dalam menghadapi disinformasi dan misinformasi politik, serta bagaimana kelompok-kelompok ini berperan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Kalimantan Selatan. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui diskusi kelompok terfokus (FGD), penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan praktik terbaik yang diterapkan oleh kedua organisasi keagamaan tersebut. Penelitian ini juga akan menyoroti tantangan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok ini dalam mengatasi disinformasi, serta bagaimana mereka dapat berperan lebih efektif dalam masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi bagaimana kelompok-kelompok keagamaan di Kalimantan Selatan menghadapi disinformasi dan misinformasi politik menjelang pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam pengalaman, strategi, dan perspektif yang diungkapkan oleh para informan. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik studi sosial yang berfokus pada pemahaman makna dan interaksi dalam konteks sosial tertentu (Creswell, 2013).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskusi kelompok terfokus (focus group discussion atau FGD). FGD dipilih karena metode ini efektif untuk memperoleh pandangan kolektif dari para informan mengenai fenomena yang sedang dikaji. Diskusi kelompok juga memungkinkan adanya interaksi antarpartisipan, yang dapat memunculkan dinamika pendapat dan ide yang tidak selalu terungkap dalam wawancara individu (Morgan, 1997). Penelitian ini melibatkan empat kelompok diskusi yang terdiri dari pimpinan dan anggota Muslimat NU, Muhammadiyah, serta beberapa tokoh masyarakat yang memiliki peran penting dalam menangani isu disinformasi di wilayah tersebut. Setiap FGD berlangsung selama 90 hingga 120 menit, dengan moderator yang memandu diskusi berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan.

Pemilihan informan dilakukan secara purposif, di mana informan dipilih berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria utama informan adalah individu yang memiliki keterlibatan langsung dalam organisasi keagamaan di Kalimantan Selatan, terutama Muslimat NU dan Muhammadiyah. Penelitian ini memilih pimpinan organisasi Muslimat NU Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua Lazismu Muhammadiyah Kalimantan Selatan, Sekretaris Badan

Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin, serta koordinator dosen agama Islam di Universitas Lambung Mangkurat sebagai informan utama. Pendekatan purposif ini bertujuan untuk mendapatkan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait dengan isu disinformasi politik di wilayah penelitian (Palinkas et al., 2015).

Setelah data dikumpulkan, analisis dilakukan dengan pendekatan tematik. Langkah pertama dalam analisis adalah reduksi data, di mana data yang tidak relevan disaring untuk memfokuskan pada informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyoroti temuan utama dari setiap diskusi. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, seperti strategi pencegahan disinformasi, penggunaan literasi digital oleh kelompok keagamaan, dan pendekatan tabayyun yang diterapkan oleh Muhammadiyah (Braun & Clarke, 2006).

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sementara triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil FGD dengan data sekunder dari dokumen-dokumen organisasi keagamaan yang relevan. Validitas internal juga diperkuat dengan member checking, di mana hasil analisis sementara dikembalikan kepada para informan untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi atas temuan yang dihasilkan (Lincoln & Guba, 1985).

Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi kelompok keagamaan dalam menangani disinformasi politik di Kalimantan Selatan. Metode ini tidak hanya relevan dengan konteks lokal, tetapi juga dapat berkontribusi pada literatur global tentang peran agama dalam menanggulangi disinformasi politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggali cara kelompok keagamaan di Kalimantan Selatan, khususnya Muslimat NU dan Muhammadiyah, dalam menangani disinformasi dan misinformasi politik menjelang pemilihan kepala daerah serentak 2024. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan kunci yang dibagi ke dalam beberapa subtopik utama: respons terhadap disinformasi, literasi digital, pendekatan komunikasi agama, dan strategi pencegahan yang diterapkan oleh organisasi keagamaan. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan

peran penting yang dimainkan oleh para pemimpin kelompok keagamaan dalam menjaga integritas informasi di lingkungan masyarakat mereka.

Respons Kelompok Keagamaan terhadap Disinformasi dan Misinformasi

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok keagamaan di Kalimantan Selatan, khususnya Muslimat NU dan Muhammadiyah, menerapkan berbagai strategi untuk mengatasi disinformasi dan misinformasi politik. Strategi-strategi tersebut bervariasi tergantung pada karakteristik organisasi dan konteks sosial-budaya di wilayah tersebut.

Secara umum, kelompok keagamaan mengatasi disinformasi dengan melakukan pencegahan melalui pendekatan yang tegas, seperti pelarangan penyebaran informasi yang tidak valid, sensor terhadap informasi yang diragukan kebenarannya, serta penerapan sanksi bagi anggota yang menyebarkan hoaks. Dalam beberapa kasus, organisasi ini juga bekerja sama dengan pemerintah dan platform media sosial untuk menindak pelanggaran yang terkait dengan penyebaran berita palsu. Sebagaimana dijelaskan oleh Liu et al. (2022), kerja sama lintas sektor antara pemerintah, masyarakat sipil, dan platform media menjadi penting dalam menekan penyebaran disinformasi, terutama menjelang peristiwa penting seperti pemilu.

Kelompok-kelompok keagamaan, khususnya Muslimat NU dan Muhammadiyah, memiliki cara tersendiri dalam merespons disinformasi politik yang beredar di masyarakat. Salah satu informan dari Muslimat NU, ML, menyatakan bahwa perempuan Muslimat NU di Kalimantan Selatan sering kali terpapar oleh berita yang tidak akurat atau manipulatif, terutama melalui media sosial dan aplikasi pesan seperti WhatsApp. "Perempuan-perempuan kita ini sangat mudah terkena imbas berita-berita yang bisa dikatakan sebagai misinformasi. Mereka sering kali terpengaruh dan dibenturkan oleh berita yang tidak jelas kebenarannya," ungkap ML.

Meski begitu, ML juga menjelaskan bahwa perempuan Muslimat NU umumnya berpikiran terbuka dan mudah diarahkan untuk mendapatkan informasi yang lebih benar. "Ketika diajak berpikir di luar urusan rumah tangga, mereka sebenarnya sangat terbuka dan mudah diarahkan," jelasnya. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok keagamaan seperti Muslimat NU memiliki potensi besar untuk menjadi agen yang efektif dalam membendung arus disinformasi politik, terutama di lingkungan masyarakat dengan tingkat literasi politik yang rendah.

Salah satu mekanisme yang umum digunakan oleh Muslimat NU adalah melalui regulasi internal. Di dalam organisasi, setiap anggota yang aktif di bidang komunikasi atau informasi

harus mematuhi pedoman yang ketat tentang apa yang boleh dan tidak boleh dibicarakan di forum-forum umum. Hal ini bertujuan untuk menjaga kredibilitas organisasi serta melindungi komunitas dari pengaruh informasi yang tidak akurat. Strategi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tandoc et al. (2018), yang menunjukkan bahwa kontrol internal dalam organisasi dapat menjadi mekanisme penting dalam membatasi penyebaran disinformasi.

Muslimat NU menerapkan pendekatan edukatif dalam menghadapi disinformasi politik. Organisasi ini secara rutin mengadakan pertemuan-pertemuan untuk memberikan pencerahan kepada anggotanya, terutama perempuan-perempuan di kalangan NU yang sering kali terpapar berita palsu dari berbagai sumber, termasuk media sosial dan platform perpesanan seperti WhatsApp. Dalam pertemuan-pertemuan ini, para pemimpin organisasi memberikan konsultasi secara teratur, yang berfokus pada literasi media dan cara menyaring informasi yang benar sebelum disebarluaskan.

Salah satu bentuk disinformasi yang sering kali menjadi perhatian Muslimat NU adalah narasi politik yang berbasis pada isu-isu agama. Menjelang pemilihan kepala daerah, misinformasi mengenai calon-calon yang didasarkan pada identitas keagamaan kerap disebar, yang menyebabkan polarisasi di kalangan pemilih Muslim. Muslimat NU berperan aktif dalam memberikan klarifikasi terkait informasi yang salah ini, dan mendorong anggotanya untuk memverifikasi setiap informasi yang mereka terima, terutama yang terkait dengan pemilu. Menurut studi dari Tandoc et al. (2020), literasi media digital menjadi kunci dalam menanggulangi disinformasi politik, khususnya di kalangan masyarakat dengan tingkat literasi digital yang rendah.

Selain itu, Muslimat NU juga menggunakan jaringan informal mereka untuk menyebarkan informasi yang benar. Di banyak wilayah pedesaan di Kalimantan Selatan, komunikasi lebih banyak terjadi dalam forum-forum keagamaan informal, seperti pengajian atau majelis taklim. Dalam konteks ini, Muslimat NU memanfaatkan forum-forum tersebut untuk menyampaikan pesan-pesan yang mendidik masyarakat terkait bahaya disinformasi dan pentingnya melakukan verifikasi informasi sebelum diteruskan. Pendekatan ini efektif karena informasi yang disampaikan oleh pemimpin keagamaan cenderung lebih dipercaya dibandingkan informasi yang berasal dari sumber lain, seperti media sosial (Egelhofer & Lecheler, 2019). Disamping edukasi, Muslimat NU juga bekerja sama dengan lembaga pemeriksa fakta seperti MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) untuk melakukan klarifikasi terhadap informasi-informasi

yang beredar. Kerja sama ini menunjukkan adanya kolaborasi yang kuat antara kelompok keagamaan dan masyarakat sipil dalam menghadapi disinformasi.

Sementara itu, informan dari Muhammadiyah, MI, menekankan pentingnya prinsip tabayyun (kehati-hatian) dalam menyaring informasi sebelum menyebarkannya. MI mengutip salah satu ayat Al-Qur'an yang menekankan bahwa setiap kali menerima informasi, seseorang harus terlebih dahulu memeriksa kebenarannya, terutama jika informasi tersebut berasal dari pihak yang memiliki reputasi meragukan. "Allah telah menegaskan, apabila datang orang-orang fasik membawa suatu berita, maka hendaknya kamu memeriksa terlebih dahulu," kata MI, mengutip Surah Al-Hujurat ayat 6. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah mengedepankan sikap kehati-hatian yang mendalam dalam menyikapi informasi politik yang tersebar, khususnya di media sosial.

Berbeda dengan Muslimat NU yang lebih menekankan edukasi melalui pencerahan, Muhammadiyah memiliki pendekatan yang lebih spesifik, yakni konsep tabayyun. Tabayyun adalah prinsip kehati-hatian dalam menyebarkan informasi, yang diambil dari ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks ini, Muhammadiyah mengajarkan anggotanya untuk tidak langsung mempercayai atau menyebarkan informasi yang mereka terima tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi. Informasi yang berasal dari sumber yang tidak jelas atau dicurigai memiliki motif politis harus diteliti lebih dalam sebelum dibagikan kepada orang lain.

Menurut para informan dari Muhammadiyah, prinsip tabayyun sangat penting dalam menghadapi misinformasi politik, terutama karena banyaknya informasi yang bersifat partisan dan manipulatif yang beredar di media sosial. Sebagai organisasi yang berkomitmen pada pendidikan dan penyebaran ajaran Islam yang moderat, Muhammadiyah selalu mengingatkan anggotanya untuk menjaga integritas informasi dan tidak terjebak dalam narasi politik yang memecah belah (Rahmawan & Garnesia, 2023).

Di Muhammadiyah, pendidikan literasi informasi juga diberikan secara berkala kepada para anggotanya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kritis dalam memilah informasi dan menghindari penyebaran berita yang dapat mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa literasi informasi sangat penting dalam menanggulangi penyebaran misinformasi, terutama di kalangan pemilih yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang proses politik (Brashier, 2024).

Muhammadiyah juga mendorong anggotanya untuk berpartisipasi dalam politik secara aktif, tetapi dengan tetap memegang prinsip independensi organisasi dari politik praktis.

Muhammadiyah tidak mendukung partai politik tertentu, tetapi memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk terlibat dalam politik selama mereka mematuhi etika dan prinsip yang ditetapkan oleh organisasi. Pendekatan ini memastikan bahwa anggota Muhammadiyah tidak mudah terpengaruh oleh kampanye-kampanye disinformasi yang seringkali memanfaatkan sentimen agama untuk kepentingan politik tertentu (Kanyang'wa & Lotshwao, 2023).

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan metode di setiap kelompok, baik Muslimat NU maupun Muhammadiyah sama-sama memiliki pendekatan yang berbasis pada nilai agama. Dalam Islam, penyebaran berita palsu dilarang keras, yang dalam hal ini mendorong organisasi keagamaan untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi di ruang publik, khususnya dalam konteks politik.

Literasi Digital di Kalangan Anggota Kelompok Keagamaan

Salah satu isu penting yang diungkap dalam penelitian ini adalah rendahnya literasi digital di kalangan anggota kelompok keagamaan, khususnya di kalangan perempuan Muslimat NU. ML menyoroti bahwa perempuan Muslimat NU sering kali mendapatkan informasi yang salah melalui grup WhatsApp, yang terkadang mengarahkan mereka untuk percaya pada berita yang tidak terverifikasi. "Hampir semua perempuan di Kalimantan Selatan ini memiliki grup WhatsApp, dan dari situ mereka mendapatkan berita yang kadang tidak difilter terlebih dahulu," ujar ML.

Temuan penelitian ini menyoroti bahwa solusi jangka panjang dalam mengatasi disinformasi politik di Kalimantan Selatan terletak pada peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat, terutama di kalangan pemimpin komunitas keagamaan. Baik Muslimat NU maupun Muhammadiyah sepakat bahwa literasi digital yang lebih baik akan membantu masyarakat untuk lebih kritis terhadap informasi yang mereka terima dan tidak langsung menyebarkannya tanpa verifikasi.

Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital merupakan salah satu faktor utama yang memicu penyebaran disinformasi dan misinformasi di Indonesia (Rahmawan & Garnesia, 2023). Menurut Nygren et al. (2022), masyarakat dengan literasi digital yang rendah cenderung lebih mudah terpapar pada berita palsu dan lebih mungkin untuk menyebarkan informasi yang salah. Literasi digital yang rendah, khususnya di daerah-daerah dengan akses terbatas terhadap pendidikan formal,

menjadi tantangan utama dalam upaya mencegah penyebaran disinformasi, terutama menjelang pemilu.

Sebagai upaya untuk meningkatkan literasi digital di kalangan anggotanya, Muslimat NU telah melakukan berbagai program pendidikan, termasuk pencerahan politik dan konsultasi rutin melalui pertemuan-pertemuan terstruktur maupun insidental. Pertemuan-pertemuan ini bertujuan untuk membekali anggota Muslimat NU dengan pengetahuan dasar tentang cara menyaring informasi yang mereka terima, terutama di era digital. Namun, meskipun upaya ini telah dilakukan, tantangan masih tetap ada, terutama terkait dengan akses terhadap sumber informasi yang terpercaya dan pendidikan politik yang memadai.

Sebagai contoh, Muslimat NU telah memulai program literasi digital yang ditujukan bagi anggotanya di Kalimantan Selatan. Program ini melibatkan pelatihan tentang cara menggunakan media sosial secara bijak, cara mengidentifikasi berita palsu, dan cara melakukan verifikasi informasi. Muhammadiyah juga telah meluncurkan inisiatif serupa, dengan menekankan pentingnya prinsip tabayyun dalam literasi digital. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang bagaimana informasi yang salah dapat memengaruhi proses demokrasi, dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam menanggulangi masalah ini (Madrid-Morales et al., 2024).

Peran Ulama dan Pemimpin Keagamaan dalam Melawan Disinformasi

Dalam diskusi yang dilakukan dengan berbagai narasumber, peran ulama dan pemimpin keagamaan sangat ditekankan dalam upaya menangkal disinformasi. Di Kalimantan Selatan, para ulama sering kali menjadi opinion leader yang memiliki pengaruh besar terhadap opini politik masyarakat. Namun, ML mengungkapkan bahwa banyak ulama, terutama dari kalangan laki-laki, cenderung enggan membahas isu politik di majelis-majelis keagamaan. "Ulama-ulama laki-laki di sini tidak suka berbicara politik di majelis. Mereka lebih fokus pada isu-isu fikih, akhlak, dan tasawuf," jelasnya.

Hal ini menciptakan tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat, terutama perempuan Muslimat NU. Kendati demikian, para pemimpin organisasi Muslimat NU tetap berusaha untuk memberikan pencerahan kepada anggotanya melalui program-program pendidikan politik yang lebih informal dan berbasis komunitas. "Kami sering melakukan pertemuan untuk memberikan penguatan agar tidak terpecah belah

karena hoaks," tambah ML. Pendekatan ini mencerminkan bahwa meskipun ulama tidak secara langsung terlibat dalam diskusi politik, peran mereka tetap penting dalam membentuk kesadaran politik yang lebih luas di kalangan masyarakat.

Pada pihak Muhammadiyah, MI menegaskan bahwa ulama dan penceramah memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Ia mengusulkan agar para ulama mengikuti sertifikasi untuk memastikan bahwa mereka memiliki literasi digital yang memadai serta pemahaman yang benar tentang hukum-hukum yang berlaku terkait penyebaran informasi. "Para penceramah harus paham betul tentang undang-undang IT dan etika berkomunikasi agar tidak terjebak dalam penyebaran informasi yang salah," kata MI. Usulan ini sejalan dengan pendekatan yang dianjurkan dalam literatur akademis tentang literasi digital, yang menekankan pentingnya pelatihan dan sertifikasi bagi komunikator publik untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi disinformasi (Brashier, 2024).

Strategi Pencegahan Disinformasi dan Misinformasi

Penelitian ini menemukan bahwa strategi pencegahan disinformasi yang diterapkan oleh kelompok keagamaan Muslimat NU dan Muhammadiyah berbeda-beda, namun saling melengkapi. Muslimat NU, misalnya, lebih menekankan pada pendekatan edukatif melalui kegiatan-kegiatan seperti pertemuan pengajian dan diskusi komunitas. Di dalam pertemuan ini, anggota Muslimat NU diberi pemahaman tentang cara mengenali dan menyaring informasi yang mereka terima, terutama informasi yang berasal dari media sosial. Sebagai salah satu cara menguatkan kesadaran ini, ML menambahkan, "Kami selalu berusaha menjaga irama komunikasi agar anggota tidak mudah terpengaruh oleh hoaks, terutama menjelang pemilu." Sementara itu, Muhammadiyah lebih menekankan pada pendekatan tabayyun, yaitu kehati-hatian dalam menyaring informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Prinsip ini diambil dari ajaran Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan pentingnya memeriksa kebenaran informasi, terutama yang berasal dari sumber yang tidak jelas atau mencurigakan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep literasi informasi yang diusulkan oleh beberapa peneliti, yang menekankan pentingnya sikap kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi di era digital (Brashier, 2024).

Penelitian ini juga menemukan bahwa kelompok-kelompok keagamaan di Kalimantan Selatan, baik Muslimat NU maupun Muhammadiyah, sering kali bekerja sama dengan pemerintah

setempat dalam menghadapi disinformasi politik. Pemerintah daerah memanfaatkan pengaruh sosial yang dimiliki oleh kelompok-kelompok keagamaan ini untuk menyebarkan pesan-pesan terkait pentingnya verifikasi informasi, serta untuk memberikan klarifikasi terhadap isu-isu politik yang sedang berkembang.

Selain bekerja sama dengan pemerintah, kelompok keagamaan juga berupaya menjalin kemitraan dengan platform media sosial, seperti WhatsApp dan Facebook, untuk menangkal penyebaran informasi yang salah. Platform-platform ini sering kali menjadi saluran utama penyebaran hoaks di kalangan masyarakat. Muhammadiyah, misalnya, telah menjalin kerja sama dengan platform-platform tersebut untuk mempromosikan penggunaan teknologi yang lebih bijak di kalangan anggotanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Nygren et al. (2022), kolaborasi dengan platform digital dapat menjadi langkah penting dalam menekan laju penyebaran disinformasi di masyarakat.

Selain pendekatan-pendekatan tersebut, penelitian ini juga menemukan bahwa literasi hukum terkait penyebaran informasi digital menjadi hal yang krusial dalam upaya pencegahan disinformasi. Informan SI dari Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin menekankan pentingnya para penceramah untuk memahami risiko hukum yang mungkin timbul jika mereka terlibat dalam penyebaran informasi yang tidak benar. "Kami selalu mengingatkan para penceramah untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi, terutama terkait isu politik, karena ada risiko hukum yang bisa mereka hadapi," ujar SI. Hal ini menunjukkan bahwa literasi hukum juga merupakan bagian penting dari strategi pencegahan disinformasi, terutama di kalangan pemimpin agama yang memiliki pengaruh besar terhadap publik.

Tantangan dalam Mengatasi Disinformasi

Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam upaya kelompok keagamaan mengatasi disinformasi politik. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi politik dan digital di kalangan masyarakat, terutama di daerah-daerah pedesaan. ML mengungkapkan bahwa banyak perempuan Muslimat NU yang masih kesulitan membedakan antara informasi yang benar dan yang salah. "Pendidikan politik di sini masih rendah, sehingga masyarakat mudah percaya pada desas-desus yang tidak jelas kebenarannya," ungkapnya.

Keberadaan media sosial sebagai platform utama penyebaran informasi juga menambah kompleksitas tantangan ini. Sebagai platform yang terbuka dan tidak terkontrol sepenuhnya,

media sosial sering kali menjadi saluran penyebaran disinformasi yang sulit diatasi, terutama di wilayah-wilayah yang akses terhadap informasi terpercaya masih terbatas (Rahmawan & Garnesia, 2023).

Selain itu, terdapat juga tantangan dalam menjaga netralitas organisasi keagamaan dalam menghadapi isu-isu politik. Meskipun baik Muslimat NU maupun Muhammadiyah berkomitmen untuk tetap independen dari politik praktis, mereka tetap menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang berusaha memanfaatkan pengaruh sosial mereka untuk tujuan politik. Hal ini diperburuk oleh adanya kelompok-kelompok yang memanfaatkan agama untuk menyebarkan disinformasi dan mempolarisasi masyarakat (Egelhofer & Lecheler, 2019).

Solusi yang Ditawarkan: Literasi dan Sertifikasi Penceramah

Penelitian ini menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi tantangan disinformasi dan misinformasi politik, terutama di kalangan kelompok keagamaan. Salah satu solusi utama adalah meningkatkan literasi digital dan literasi informasi di kalangan pemimpin dan anggota organisasi keagamaan. Pendekatan literasi ini mencakup pendidikan tentang cara mengenali informasi yang salah, serta memberikan pelatihan tentang penggunaan teknologi digital secara etis dan bertanggung jawab.

MI dari Muhammadiyah menambahkan bahwa sertifikasi bagi para penceramah atau komunikator publik juga menjadi salah satu solusi penting. Sertifikasi ini tidak hanya mencakup pengetahuan agama, tetapi juga literasi digital dan pemahaman hukum yang memadai tentang penyebaran informasi. "Sertifikasi ini penting agar para penceramah tidak hanya paham agama, tetapi juga tahu bagaimana menyampaikan informasi yang benar dan sesuai dengan hukum," jelas MI.

Upaya ini sejalan dengan temuan dari beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa literasi informasi dan digital merupakan kunci dalam menangkal penyebaran disinformasi, terutama di kalangan masyarakat yang memiliki tingkat literasi politik yang rendah (Nygren et al., 2022; Brashier, 2024).

Berdasarkan temuan ini, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas kelompok-kelompok keagamaan dalam menghadapi disinformasi politik. Pertama, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan organisasi keagamaan untuk mempromosikan literasi digital di kalangan masyarakat. Kedua, platform media sosial harus

lebih proaktif dalam bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk mengurangi penyebaran informasi yang salah, terutama dalam konteks pemilu.

Selain itu, penting bagi pemerintah untuk mendukung inisiatif-inisiatif lokal yang berfokus pada peningkatan literasi politik dan digital di kalangan pemilih. Kelompok-kelompok keagamaan dapat memainkan peran penting dalam inisiatif-inisiatif ini, mengingat pengaruh sosial mereka di masyarakat. Inisiatif ini juga perlu diintegrasikan dengan program-program pendidikan formal untuk menciptakan pemilih yang lebih kritis dan berdaya dalam menghadapi informasi yang salah.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan berdasarkan temuan penelitian ialah bahwasanya kelompok keagamaan di Kalimantan Selatan, khususnya Muslimat NU dan Muhammadiyah, memainkan peran penting dalam menghadapi disinformasi dan misinformasi politik. Dengan pendekatan yang berbeda-beda, kedua organisasi ini berupaya untuk meningkatkan literasi digital dan informasi di kalangan anggotanya, serta mempromosikan prinsip kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan informasi. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup kompleks, terutama terkait dengan rendahnya literasi politik dan digital di masyarakat, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendidikan dan sertifikasi komunikator dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan disinformasi.

Diskusi

Kelompok keagamaan di Kalimantan Selatan, seperti Muslimat NU dan Muhammadiyah, memainkan peran krusial dalam mengatasi disinformasi dan misinformasi politik, terutama menjelang pemilihan kepala daerah serentak. Disinformasi politik, yang sering menyebar melalui media sosial, berpotensi membahayakan proses demokrasi dan merusak kohesi sosial masyarakat. Muslimat NU dan Muhammadiyah, sebagai dua organisasi keagamaan besar, mengadopsi strategi yang berbeda namun berfokus pada tujuan serupa: mencegah penyebaran informasi yang salah melalui pendekatan literasi informasi, kehati-hatian, dan nilai-nilai agama yang relevan dengan konteks politik.

Kelompok keagamaan memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, di mana religiositas sangat tinggi, masyarakat lebih cenderung mempercayai pemimpin agama dibandingkan sumber informasi lainnya (Nygren et al., 2022). Oleh karena itu, Muslimat NU dan Muhammadiyah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang mereka sebarkan akurat dan dapat dipercaya. Sebagai contoh, perempuan

Muslimat NU di Kalimantan Selatan seringkali menjadi target disinformasi yang beredar melalui WhatsApp, media yang banyak digunakan oleh kelompok ini. Informasi yang salah biasanya menyangkut isu-isu sensitif seperti agama, gender, dan politik, yang dapat memengaruhi preferensi politik mereka.

Strategi Muslimat NU dalam menghadapi disinformasi terlihat dari upaya mereka untuk memberikan pencerahan politik dan konsultasi rutin kepada anggotanya. Pendekatan ini menunjukkan keaktifan organisasi dalam membekali anggota dengan kemampuan literasi informasi yang lebih baik. Pencerahan ini dilakukan secara terstruktur melalui pertemuan rutin dan insidental, dengan tujuan menanamkan pemahaman yang lebih kritis terhadap informasi yang diterima. Literasi informasi sangat penting dalam konteks ini, karena memungkinkan individu untuk lebih bijak dalam menyaring informasi yang mereka terima, terutama di era digital yang sering kali tidak terkontrol (Brashier, 2024). Dalam konteks Kalimantan Selatan, rendahnya literasi digital menjadi salah satu alasan mengapa disinformasi dapat menyebar dengan cepat.

Sementara itu, Muhammadiyah mengadopsi pendekatan berbasis tabayyun atau kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan informasi. Pendekatan ini berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. MI dari Muhammadiyah menegaskan bahwa tabayyun tidak hanya merupakan bagian dari ajaran agama, tetapi juga merupakan strategi efektif dalam menangkal disinformasi, khususnya dalam ranah politik. Sikap kehati-hatian ini sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa memverifikasi informasi merupakan salah satu strategi utama dalam mencegah penyebaran disinformasi (Brashier, 2024).

Selain itu, peran ulama dan pemimpin keagamaan di Kalimantan Selatan memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini politik masyarakat. Ulama sering kali menjadi rujukan utama bagi masyarakat untuk memahami isu-isu sosial dan politik. Meski begitu, banyak ulama, terutama dari kalangan laki-laki, cenderung menghindari diskusi politik di majelis-majelis mereka. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam pendidikan politik bagi masyarakat umum. Meski ulama tidak secara aktif membahas politik, pemimpin Muslimat NU berupaya memberikan pendidikan politik kepada anggotanya melalui pertemuan komunitas yang informal. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi politik di kalangan anggota, terutama menjelang pemilu, guna mencegah mereka terpengaruh oleh hoaks yang sering kali memecah belah masyarakat.

Selain masalah literasi politik, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat menjadi tantangan besar dalam mengatasi disinformasi. Literasi digital yang rendah membuat masyarakat cenderung menerima informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Hal ini diperparah oleh penggunaan media sosial yang semakin luas, yang menjadi salah satu saluran utama penyebaran disinformasi (Nygren et al., 2022). Dalam kondisi seperti ini, peningkatan literasi digital melalui program yang lebih luas dan terstruktur sangat diperlukan. Literasi digital yang efektif tidak hanya membantu masyarakat untuk mengenali informasi palsu, tetapi juga memberikan mereka alat yang diperlukan untuk memverifikasi informasi dengan lebih baik.

Selain literasi digital, literasi hukum juga sangat penting bagi para penceramah dan komunikator publik. Dalam wawancara dengan SI, terungkap bahwa banyak penceramah di Kalimantan Selatan masih belum sepenuhnya memahami risiko hukum terkait penyebaran informasi yang salah. Penceramah harus memahami aturan hukum yang berkaitan dengan penyebaran informasi, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Literasi hukum ini penting untuk mencegah pelanggaran yang tidak disengaja oleh para penceramah atau pemimpin agama. Pemahaman tentang regulasi informasi digital merupakan langkah penting dalam mencegah penyebaran disinformasi (Kanyang'wa & Lotshwao, 2023).

Strategi lain yang diusulkan dalam upaya mencegah disinformasi adalah pelatihan dan sertifikasi bagi para penceramah. Sertifikasi ini tidak hanya mencakup pengetahuan agama, tetapi juga literasi digital dan pemahaman hukum yang relevan dengan penyebaran informasi. Sertifikasi dianggap penting untuk memastikan bahwa penceramah memiliki kapasitas yang memadai dalam menyampaikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Pendekatan ini juga relevan dengan literatur yang menekankan pentingnya pelatihan formal bagi komunikator publik dalam upaya menangkal disinformasi (Brashier, 2024).

Selain melalui pencerahan politik, Muslimat NU juga melibatkan anggotanya dalam pelatihan literasi digital yang bertujuan meningkatkan kesadaran kritis terhadap informasi yang beredar, terutama di media sosial. Pendekatan ini telah menunjukkan dampak positif, karena para anggota mulai lebih bijaksana dalam menyaring informasi yang mereka terima. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa literasi digital memainkan peran penting dalam

mencegah penyebaran informasi yang salah, terutama di kalangan masyarakat yang belum memiliki akses penuh terhadap pendidikan politik (Nygren et al., 2022).

Kerja sama antara organisasi keagamaan dengan pemerintah dan media juga dipandang penting dalam memerangi disinformasi. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa inisiatif untuk memblokir situs-situs penyebar hoaks dan menyelenggarakan kampanye literasi digital. Namun, upaya ini belum cukup efektif karena disinformasi masih terus menyebar melalui platform media sosial. Oleh karena itu, kolaborasi antara kelompok masyarakat, termasuk kelompok keagamaan, diperlukan untuk memastikan bahwa literasi digital dan informasi dapat ditingkatkan secara lebih luas (Rahmawan & Garnesia, 2023).

Lebih lanjut, penelitian ini juga menyoroti pentingnya kelompok keagamaan dalam mempromosikan etika komunikasi yang baik di kalangan anggotanya. Muslimat NU, misalnya, menerapkan prinsip-prinsip komunikasi profetik yang menekankan pada nilai-nilai humanisasi, pembebasan, dan transendensi. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada kebenaran informasi, tetapi juga pada cara penyampaian yang etis dan bermakna. Dengan berpegang pada etika komunikasi yang baik, kelompok keagamaan dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam mempromosikan diskusi politik yang sehat di kalangan masyarakat (Amalia & Palapah, 2023).

Di sisi lain, Muhammadiyah menggunakan prinsip tabayyun dalam menangkal disinformasi, yang tidak hanya relevan dalam konteks agama, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika menerima informasi dari media sosial atau sumber lain. Kehati-hatian dalam menyaring informasi menjadi strategi yang penting untuk mencegah penyebaran disinformasi, terutama yang sering digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi opini publik. Pendekatan ini sejalan dengan beberapa studi yang menunjukkan bahwa kehati-hatian dalam menyaring informasi adalah salah satu langkah penting dalam menghadapi arus disinformasi yang semakin kuat (Kanyang'wa & Lotshwao, 2023).

Tantangan lain yang muncul dalam konteks pemilihan kepala daerah di Kalimantan Selatan adalah disinformasi yang berkaitan dengan isu-isu gender, agama, dan identitas politik. Muslimat NU dan Muhammadiyah berupaya mengatasi isu-isu ini melalui pendidikan politik, konsultasi rutin, dan pencerahan kepada anggotanya. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggota kelompok keagamaan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses politik dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi palsu yang sering kali digunakan untuk tujuan politis.

Dengan kombinasi pendidikan literasi digital, literasi hukum, dan nilai-nilai agama yang diajarkan melalui komunikasi profetik, Muslimat NU dan Muhammadiyah dapat membantu menjaga stabilitas sosial dan politik di Indonesia, terutama menjelang pemilu. Pendekatan berbasis agama ini tidak hanya memberikan wawasan tentang cara menangkal disinformasi, tetapi juga menunjukkan potensi besar kelompok keagamaan dalam mempromosikan dialog yang sehat dan etis di tengah arus informasi yang sering kali tidak akurat.

KESIMPULAN

Kajian ini menyoroti peran signifikan kelompok keagamaan dalam menangani disinformasi dan misinformasi politik di Kalimantan Selatan, terutama menjelang pemilihan kepala daerah. Sebagai dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Muslimat NU dan Muhammadiyah memainkan peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam melawan arus informasi yang salah. Pendekatan yang digunakan kedua organisasi tersebut memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana institusi berbasis agama dapat menjadi agen yang kuat dalam menjaga stabilitas informasi di tengah masyarakat yang terpapar oleh disinformasi politik yang masif.

Muslimat NU, melalui berbagai program pencerahan politik dan konsultasi rutin, menekankan pentingnya literasi informasi di kalangan anggotanya. Pendekatan ini sangat relevan, mengingat banyaknya anggota Muslimat NU yang terpapar oleh berita palsu, terutama melalui platform media sosial seperti WhatsApp. Sebagai salah satu organisasi perempuan terbesar, Muslimat NU memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini di kalangan perempuan di Kalimantan Selatan. Program literasi yang mereka terapkan tidak hanya berfokus pada literasi politik tetapi juga mencakup literasi digital, yang semakin penting di era modern di mana penyebaran informasi tidak lagi didominasi oleh media tradisional, melainkan oleh media sosial yang sulit diawasi.

Selain itu, Muhammadiyah menerapkan pendekatan yang berbeda dengan menekankan prinsip tabayyun atau kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan informasi. Prinsip ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an yang mengajarkan agar setiap informasi harus diverifikasi sebelum disebarluaskan. Dalam konteks disinformasi politik, tabayyun menjadi alat yang sangat relevan untuk menangkal penyebaran berita palsu yang kerap kali dimanfaatkan oleh aktor politik tertentu untuk memengaruhi opini publik. Muhammadiyah juga berperan penting dalam menjaga integritas informasi dengan mendorong sertifikasi bagi para penceramah dan

tokoh agama, memastikan bahwa mereka tidak hanya paham agama tetapi juga memiliki literasi digital dan hukum yang memadai.

Kesimpulan penting dari kajian ini adalah bahwa literasi informasi dan digital merupakan kunci dalam menghadapi disinformasi, terutama di wilayah yang tingkat pendidikan formalnya masih rendah. Di Kalimantan Selatan, rendahnya literasi digital dan politik membuka celah bagi disinformasi politik untuk menyebar luas di masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan literasi yang diberikan oleh Muslimat NU dan Muhammadiyah kepada anggotanya sangat penting dalam membekali mereka dengan kemampuan kritis yang diperlukan untuk menyaring informasi yang beredar. Literasi ini tidak hanya terbatas pada penguasaan teknologi digital, tetapi juga mencakup pemahaman hukum terkait penyebaran informasi yang salah, yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Lebih lanjut, hasil kajian ini menunjukkan bahwa ulama dan pemimpin keagamaan memiliki tanggung jawab besar dalam mengedukasi masyarakat terkait dengan disinformasi. Di Kalimantan Selatan, ulama sering kali menjadi rujukan utama masyarakat dalam memahami isu-isu politik dan sosial. Namun, tantangan muncul ketika banyak ulama cenderung menghindari diskusi politik dalam majelis mereka, yang pada akhirnya menciptakan kesenjangan dalam pendidikan politik bagi masyarakat. Oleh karena itu, Muslimat NU dan Muhammadiyah mengambil peran penting dalam memberikan pencerahan politik kepada anggotanya melalui pendekatan yang lebih informal, seperti pertemuan komunitas dan diskusi kelompok.

Upaya ini memperlihatkan bahwa kelompok keagamaan dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, terutama di tengah tantangan disinformasi yang terus meningkat. Program literasi yang diterapkan oleh kedua organisasi ini juga menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas sangat efektif dalam memberikan pendidikan politik dan digital kepada masyarakat. Dengan menggunakan jaringan yang mereka miliki, Muslimat NU dan Muhammadiyah dapat menjangkau lebih banyak orang dan memberikan dampak yang lebih luas dalam upaya melawan disinformasi.

Selain literasi digital dan informasi, kajian ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara kelompok keagamaan dan lembaga pemerintah dalam memerangi disinformasi. Meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai inisiatif, seperti memblokir situs-situs penyebar hoaks dan menyelenggarakan kampanye literasi digital, kerja sama dengan organisasi masyarakat seperti Muslimat NU dan Muhammadiyah masih diperlukan. Kolaborasi ini dapat

memperkuat upaya literasi yang telah dilakukan dan membantu memperluas cakupan pendidikan literasi informasi di kalangan masyarakat yang lebih luas.

Kesimpulannya, kelompok keagamaan seperti Muslimat NU dan Muhammadiyah memiliki peran penting dalam menghadapi disinformasi politik di Kalimantan Selatan. Dengan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi, kedua organisasi ini mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun kesadaran kritis di kalangan anggotanya dan masyarakat luas. Melalui literasi informasi, literasi digital, dan pemahaman hukum yang lebih baik, kelompok-kelompok ini mampu menjaga integritas informasi di tengah arus disinformasi yang semakin meningkat menjelang pemilihan kepala daerah. Kontribusi kelompok keagamaan dalam menangkal disinformasi politik menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berperan dalam aspek keagamaan, tetapi juga dalam memperkuat proses demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Armitage, R., & Vaccari, C. (2021). Misinformation and disinformation. In *The Routledge companion to media disinformation and populism* (pp. 38–48). Routledge.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). *Survei penetrasi internet Indonesia*.
- Austin, E. W., Borah, P., & Domgaard, S. (2021). COVID-19 disinformation and political engagement among communities of color: The role of media literacy. *The Harvard Kennedy School Misinformation Review*.
- Bennett, W. L., & Livingston, S. (2018). The disinformation order: Disruptive communication and the decline of democratic institutions. *European Journal of Communication*, 33(2), 122–139. <https://doi.org/10.1177/0267323118760317>
- Brashier, N. M. (2024). Fighting misinformation among the most vulnerable users. *Current Opinion in Psychology*, 101813.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.

Campbell, K., & Coleman, K. (2024). Misinformation, disinformation, and reckoning in journalism. *Electronic News*. <https://doi.org/10.1177/19312431241259972>

Ecker, U., Roozenbeek, J., Van der Linden, S., Tay, L. Q., Cook, J., Oreskes, N., & Lewandowsky, S. (2021). Misinformation remains a threat to democracy.

Hamdi, S. (2023). Jamaah tabligh dan pergeseran identitas politik keagamaan pada pemilihan presiden 2019 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. *Harmoni*, 22(1), 143–166. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v1i22.661>

Ikran, A. A. (2023). Exploring co-regulation as a solution to automated disinformation in Kenya. *Journal of Intellectual Property and Information Technology Law (JIPIT)*, 3(1), 201–256. <https://doi.org/10.52907/jipit.v3i1.262>

Jw, C. (1998). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions*.

Kanyang'wa, M., & Lotshwao, K. (2023). Understanding misinformation and disinformation in elections: Lessons from the Malawi 2019 presidential elections. *African Journal of Democracy & Election Research (AJDER)*, 3(2).

Kurniawan, B. (2018). Politisasi agama di tahun politik: Politik pasca-kebenaran di Indonesia dan ancaman bagi demokrasi. *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(1), 133. <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-07>

Lecheler, S., & Egelhofer, J. L. (2022). Disinformation, misinformation, and fake news: Understanding the supply side. In *Knowledge resistance in high-choice information environments* (pp. 69–87).

Legowo, R. S. (2023). Ketika penyebaran berita palsu melahirkan industri baru: Studi kasus drone empit. *Komuniti Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 15(1), 75–97. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v15i1.20053>

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1988). Criteria for assessing naturalistic inquiries as reports.

Martínez-García, L., & Ferrer, I. (2023). Fact-checking journalism: A palliative against the COVID-19 infodemic in Ibero-America. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 100(2), 264–285. <https://doi.org/10.1177/10776990231164168>

Matanji, F., Tully, M., Mudavadi, K. C., Diop, L., & Madrid-Morales, D. (2024). Media literacy and fact-checking as proactive and reactive responses to misinformation in Kenya and Senegal. *African Journalism Studies*, 1–18.

McRae, D., Quiroga, M. d. M., Russo-Batterham, D., & Doyle, K. (2022). A pro-government disinformation campaign on Indonesian Papua. *HKS Misinfo Review*. <https://doi.org/10.37016/mr-2020-108>

Morgan, D. L. (1996). *Focus groups as qualitative research* (Vol. 16). Sage Publications.

Neylan, J. (2021). The impact of online disinformation on democracy in Taiwan.

Noorbani, M. A. (2023). Peran penyuluh agama dalam respons dini konflik keagamaan di kota Depok dan kota Bogor. *Dialog*, 46(1), 100–113.

Nygren, T., Frau-Meigs, D., Corbu, N., & Santoveña-Casal, S. (2022). Teachers' views on disinformation and media literacy supported by a tool designed for professional fact-checkers: Perspectives from France, Romania, Spain, and Sweden. *SN Social Sciences*, 2(4), 40.

Ouyang, X., Zhu, Y., Luo, S., & Huang, C. (2021). Disinformation reinforces female political inequality and social misogyny. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211020.161>

Palapah, M. A. O., Kusumalestari, R. R., Hernawati, R., & Darmawan, F. (2023). Hate speech: Commentary analysis on celebrity Instagram accounts based on prophetic communication. *Jurnal ASPIKOM*, 8(2), 385–398.

Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed-method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42, 533–544.

Prathama, N. A., Hasani, M. R., & Akbar, M. I. (2022). SARA hoax: Phenomena, meaning, and conflict management. *Jurnal ASPIKOM*, 7(2), 129.

<https://doi.org/10.24329/aspikom.v7i2.1117>

Rahmawan, D., Garnesia, I., & Hartanto, R. (2023). Checking the fact-checkers: Analyzing the content of fact-checking organizations as initiatives for hoax eradication in Indonesia. *Jurnal ASPIKOM*, 8(2), 241–256.

Rao, A., & Lerman, K. (2022). Partisan asymmetries in exposure to misinformation. *Scientific Reports*, 12(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-022-19837-7>

Soares, F. B., Recuero, R., Volcan, T., Fagundes, G., & Sodr , G. (2021). Research note: Bolsonaro’s firehose: How COVID-19 disinformation on WhatsApp was used to fight a government political crisis in Brazil. *HKS Misinfo Review*. <https://doi.org/10.37016/mr-2020-54>

Steinfeld, N. (2022). The disinformation warfare: How users use every means possible in the political battlefield on social media. *Online Information Review*, 46(7), 1313–1334. <https://doi.org/10.1108/oir-05-2020-0197>

Tandoc Jr, E. C., Lim, Z. W., & Ling, R. (2018). Defining “fake news”: A typology of scholarly definitions. *Digital Journalism*, 6(2), 137–153.

Topan, A. (2022). Respons Aliansi Ulama Madura (AUMA) terhadap dinamika politik keagamaan di Pamekasan Madura. *Entita Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(1), 92–106. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v4i1.5576>